

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003.
- Andespa, Roni. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2011
- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Busro, Achmad. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta : Percetakan Pohon Cahaya, 2011.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdia, *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafinfo Persada, 2016.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, ed. 4 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Hadjon, Philipus M. *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1997.
- Hasan, Djuhaendah. *Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1996.

- Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.* Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Moechtar, Oemar. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Nurasa, Akur, dan Dian, A.M. *Tuntunan Pembuatan Akta Tanah*. Yogyakarta: STPN Press, 2020.
- Ridwan, Juniarso, dan Ahmad Sodik. *Hukum Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2009.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Santoso, Urip. *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*. Jakarta: Prenadamedia, 2017.
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Binacipta, Cetakan Pertama, 1991.

- Setiawan, Rachmat. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, ed. 6. Bandung: Putra A Bardin, 1999.
- Sinaga, Sahat HMT. *Jual Beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak*. Bekasi: Pustaka Sutra, 2007.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Raad*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.
- Subekti, R. *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003).
- Tehupeiory, Aartje. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Raih Asas Sukses, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Jurnal Ilmiah

- Adianda, Shafira, Rembrandt, dan Jean Elvardi, “Tanggung Jawab PPAT atas Akta Jual Beli yang Dibatalkan Melalui Putusan Pengadilan,” *Jurnal Niara* 19, no. 1 (2026).

- Agustin, E., Fahmi, dan Irawan Harahap, “Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Melalui Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah,” *Collegium Studiosum Journal*, no. 1 (2025).
- Agussari, R., Djoni S. Gozali, dan A. Faishal, “Akta Perdamaian oleh Notaris dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Media of Law and Sharia* 3, no 2 (2022).
- Alfianto, Dwi, Ali Rido, dan Geraldo Valento Wijaya, “Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan* 4, no. 4 (2024).
- Amiludin, dkk., “Transaksi Jual Beli Tanah Girik Dan Kekuatan Hukumnya,” *Jurnal Dinamika UMT*, no. 1 (2023).
- Arben, Ali, dan Shandy Utama, “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Andrew Law Journal* 3, no. 1 (2024).
- Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, no. 2 (2023).
- Arum, Sekar Pupita, “Kedudukan Akta Jual Beli Tanah Milik Anak di Bawah Umur Tanpa Adanya Izin Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 100/Pdt.G/2021/PN.Skt),” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023).

Aulia, Arsiendy, “Prinsip Kehati-Hatian PPAT Dalam Proses Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Perwujudan Kepastian Hukum,” *Recital Review*, no. 1 (2022).

Basuki, Glenn Daniel dan Mia Hadiati, “Keabsahan Akta Jual Beli *Letter C* Yang Diterbitkan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah,” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025).

Cevitra, Mendy dan Gunawan Djajaputra, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1364 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya,” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023).

Dewi, I Gusti Ayu Manik Silvia, “Kewenangan Notaris dan PPAT Dalam Membuat Akta Otentik Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau dari Hukum Positif di Indoensia,” *Actual Justice* 10,, no. 1 (2025).

Dewi, N. M. Trisna, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022).

Djatzmiko, Andreas Andrie, Fury Setyaningrum, dan Rifana Zainudin, “Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia,” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, no. 1 (2022).

Drajat, Binar Tresna, “Status Hukum Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Tanah untuk Pencegahan Sengketa Tanah di Indonesia,” *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 4 (2026).

Elizabeth, Jovita dan Teddy Anggoro, “Pembatalan Akta Jual Beli PPAT yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan

- Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 17/Pdt.G/2012/PT.TK), *Palar : Pakuan Law Review* 8, no. 1 (2022).
- Gafur, Tri Baginda K.A., dan Nia Kurniati, “Pertanggungjawaban Perdata Kebakaran Hutan Di Indonesia Antara Perbuatan Melwan Hukum atau Pertanggungjawaban Mutlak,” *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora*, (2022).
- Hadi, I Gusti Apsari, “Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Camat Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, no. 3 (2021).
- Hidayat, A. K., dan Yunanto Yunanto, “Kepastian Hukum Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Pihak,” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025).
- Inawati, “Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah,” *Recital Review*, no. 1 (2023).
- Intania, Aria Zurnetti, dan S. Elvandari, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 196/Pid.B/2020/PN. Pdg),” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024).
- Kamaria, Amrin, “Implementasi Kebijakan Penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 3 (2021).

- Kusdianto, Mario, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi PPAT yang Menerbitkan Surat Setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Fiktif," *Jurnal Education and development*, no. 1 (2024).
- Kusuma, Syarif Hadi, "Pembatalan Akta Jual Beli Yang Disebabkan Oleh Pemalsuan Tanda Tangan," *Journal Sains Student Reasearch*, no. 1 (2024).
- Limbong, Tania Mayshara, "Tanggung Jawat PPAT atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 9BPHTB) Pada Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kota Medan," *Jurnal Ilmiah Penelitian* 3, no. 1 (2022).
- Lubis, Adi Utama Pandapotan, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Autentik," *Jurnal Somasi* 1, no. 1 (2020).
- Maghribi, M. F., dan B. Ispriyarso, "Peran PPAT Terhadap Aspek Perpajakan Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dan Bangunan," *Notarius*, no. 1 (2022).
- Murni, C. S. dan Sumirahayu Sulaiman, "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah," *Lex Librum* 8, no. 2 (2022).
- Murni, C. S., "Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Proses Peralihan Jual Beli Hak atas Tanah," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, no. 1 (2021).
- Ningsih, Ayup Suran dan Harumsari Puspa Wardhani, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi." *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (2024).

- Noer, C. N. Rivani, dkk., “Pembatalan Akta Jual Beli (AJB) Ppats Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sah,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, no. 1 (2026).
- Pintoko, Pribadi Bombong Fiqtian, “Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Sebagai *Intellectual Dader* Di Bidang Perpajakan Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan,” *Jurnal Education And Development* 9, no. 4 (2021).
- Pratama, Nur Fadhi, dan Ana Silviana, “Studi Komparatif Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Jual Beli,” *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024).
- Putri, Adelia, dkk., “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Melalui Proses E-Litigasi Di Indonesia,” *Al Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, no. 2 (2026).
- Putri, H. Julaika dan Sri Murhayati, “Metode Pengumpulan Data Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025).
- Putriyadi, Melty Shabrinna dan Yulies Tiena Masriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta Dibawah Tangan,” *Notary Law Research*, no. 2 (2022).
- Ramadhan, Ahsanul Rizky, Firman Muntaqo, dan Iza Rumesten RS., “Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan Dan Pemanfaatan Tanah,” *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, no. 1 (2022).
- Riveni, Cinta Natasya, dkk., “Pembatalan Akta Jual Beli (AJB) Ppats Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sah,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & hukum*, no. 1 (2026).

- Rumadanu, Friko dan Gunawan Djajaputra, “Kepastian Hukum Kedudukan Akta Jual Beli (AJB) Sebagai Dasar Gugatan” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no 2 (2025).
- Sarapi, Virgin Venlin, Putra Hutomo, dan Mohammad Ismed, “Tanggung Jawab PPAT Dalam Akta Jual Beli Tanah Terkait Adanya Utang Piutang,” *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no.1 (2024).
- Sari, D. A., dan M. Sudirman, dan Benny Djaja, “Pertanggungjawaban Hukum Perdata Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Nomor 86/PDT.G/2009/PN.DEPOK),” *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 1 (2024).
- Sugiasuti, N. Yunita, “Ganti Rugi Akibat Wanprestasi (Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan *Civil Code of The Netherlands*),” no. 2 (2022).
- Sihotang, A. P., dkk., “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi,” *Jurnal USM Law Review*, no. 3 (2023).
- Silado, Audrey Bindang dan Moody R. Syailendra, “Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah,” *Unes Law Review*, no. 2 (2023).
- Sitanggang, C. E. Patricia, dkk., “Restitutio in Integrum in Criminal Regulation of Restitution for the Victims of Criminal Acts,” *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 1 (2024).
- Supriandi, Andi, “Pendekatan Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, no. 2 (2025).

Suryoutomo, Markus, dkk. “Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, no. 4 (2025).

Susanto, Irfan, dkk., “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu UU ITE,” *Locus : Journal of Academic Literature Review* 4, no. 4 (2024).

Utama, Muhammad Rafid, “Kewenangan PPAT Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli,” *Grondwet* 3, no. 2 (2024).

Wiharjo, Vincentius Jonathan, “Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Membuat Akta Jual Beli Berdasarkan Akta Kuasa Palsu Secara Administratif dan Perdata.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (2024).

Zakaria, Asep Yuyun, “Pendaftaran Tanah Sebagai Bentuk Jaminan Kepastian Hukum Dan Kepastian Hak Atas Tanah,” *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 2, no. 1 (2025).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Wawancara

Kumala, Yudha Cahya. Wawancara, Notaris dan PPAT Kabupaten Bekasi, 6 Mei 2026.

Suryanti, Ningsih. Wawancara, Notaris dan PPAT Kabupaten Bekasi, 10 Mei 2026.